



**Judul** : Sepakati Anggaran Ristek Dikti - DPR: Awas Ada Program Duplikasi  
**Tanggal** : Minggu, 08 September 2019  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

## Sepakati Anggaran Ristek Dikti DPR: Awas Ada Program Duplikasi

KOMISI VII DPR menyetujui usulan pagu anggaran belanja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) sebesar Rp 715,5 miliar lebih untuk tahun 2020. Namun DPR memberikan catatan agar beberapa kegiatan duplikasi yang terjadi antar LPNK di Kementerian Ristek Dikti hendaknya ditertibkan dan dikelola berdasarkan skala prioritas.

“Secara jumlah pagu anggaran kita setuju, tapi di dalam program berdasarkan masukan selama RDP (Dapat Dengar Pendapat), banyak catatan yang diberikan untuk Ristekdikti dan LPNK. Di sini kita menjumpai beberapa duplikasi program,” kata anggota Komisi VII DPR Andi Yuliani Paris dalam Rapat Kerja bersama jajaran Menteri Ristek Dikti Muh. Nasir bersama sejumlah Pimpinan LPNK seperti LIPI, Bapeten, BPPT di Jakarta, Kamis lalu.

Karena itu dia meminta Menteri Nasir untuk mampu melakukan koordinasi melihat program-program nasional yang dianggap menjadi prioritas. Bagaimanapun, program duplikasi di kementerian tidak boleh terjadi karena hanya akan mubazir.

“Apabila terjadi duplikasi harus dicegah. Karena anggaran di Kementerian Ristek Dikti sudah sedikit, tapi jangan pula mengerjakan hal sama,” warning Andi.

Dia lalu menyoroti program dan anggaran yang digelontorkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dalam negeri. Hendaknya, hal itu berdasarkan kajian mendalam dan tidak mengada-ngada. Sebab dia mendapati program Iptek yang dirancang oleh LIPI ini beberapa

di antaranya tidak fokus.

“Saya minta tolong masing-masing yang diusulkan ini sudah sampai pada tahap mana? Apakah pengkajian atau apa? Kita juga mengharapkan LIPI bisa menjalankan kerja sama dengan LPNK lainnya dan dikomersialisasikan secara massal dan bersama-sama. Intinya, kami akan mengawasi 5 tahun ke depan,” tambah Andi.

Anggota Komisi VII Kurtubi meminta Kementerian Ristek Dikti untuk bisa segera merealisasikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) untuk kesejahteraan bangsa. Toh dari segi anggaran, DPR sudah memberikan dukungan yang memadai sebab kebutuhan PLTN saat ini sudah tidak bisa dianggap hal yang riskan lagi tapi menjadi kebutuhan bangsa untuk memperoleh udara lebih bersih sekaligus menopang industrialisasi di tanah air.

“Industri didorong berbasis komponen lokal karena itu butuh kepastian energi yang cukup tanpa mempengaruhi energi lain,” katanya.

Kurtubi menegaskan, pembangunan PLTN ini bukan berarti menafikkan pembangkit listrik yang sudah ada sebelumnya seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air, Angin, Tenaga Diesel yang sudah ada jauh hari sebelumnya. PLTN ini lebih kepada menghadirkan kepastian energi yang mencukupi untuk industri sekaligus untuk kebutuhan penelitian.

“(PLTN) Ini butuh dukungan dari Kementerian Ristek Dikti dan Komisi VII agar di periode kedua nanti (Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin) Pak Menteri bisa memberikan dorongan pembangunan PLTN di dalam negeri,” tambah dia. ■ KAL